

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah Satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat capaian Sumber Daya Manusianya, bahkan pendidikan merupakan bagian utama untuk suatu Negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi dunia. Setiap Negara punya kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa terkecuali, pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 31 ayat 1 telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal, dalam rangka untuk mewujudkan amanat tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

Visi misi pendidikan Indonesia adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif dalam menjawab segala tantangan global. (Tilaar, 2008: 42).

Angka Partisipasi Kasar (APK) kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi di semua jenjang pendidikan

dibandingkan dengan APK bagi keluarga miskin. Untuk membantu meningkatkan pendidikan bagi masyarakat miskin, maka kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan untuk mencapai misi 5 K, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan layanan Pendidikan Dasar, menengah dan atas yang bermutu, serta memberi kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah-daerah konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat. (Revida, 2005: 32).

Keadaan tersebut tentu perlu terus diperbaiki sebagai bentuk pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, serta untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam kesepakatan internasional seperti *Education For All* (EFA) dan *Millenium Development Goals* (MDGs) yaitu memberikan pendidikan yang merata pada semua anak, dimanapun, laki-laki dan perempuan. (Tilaar, 2008: 44).

Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain.

Berawal dari kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudoyono tahun 2005 untuk mengurangi subsidi BBM dan merealokasikan sebagian besar dananya keempat program besar yang terdiri dari : (1) Program BOS dan Beasiswa Miskin, (2) Jaminan Pelayanan Kesehatan, (3) Infrastruktur Pedesaan, (4) Subsidi Langsung Tunai khususnya untuk masyarakat miskin akibat dari meningkatnya harga BBM. Keempat program dirancang untuk meningkatkan mutu dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan dan bantuan langsung tunai. Salah satu program dibidang pendidikan mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar adalah program beasiswa bagi siswa miskin atau yang lebih dikenal sebagai Bantuan Siswa Miskin (BSM). Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan dana ke sekolah untuk tingkat SD-SMA/SMK baik negeri ataupun swasta. Program ini mulai dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2005 bersamaan dengan awal tahun ajaran 2005/2006. Melalui program beasiswa miskin ini diharapkan visi Indonesia dibidang Pendidikan dapat terwujud.

Melalui pemberian bantuan siswa miskin (BSM) yang lebih luas dengan jumlah yang lebih besar sebagai bantuan untuk memenuhi biaya pribadi siswa melangsungkan pendidikannya sampai dengan selesai. Kondisi ini sangat memungkinkan siswa dari keluarga miskin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dengan diberikannya BSM kepada siswa dari keluarga miskin akan dapat meningkatkan angka melanjutkan dari angka sebesar 97,93%. tersebut. Selain itu pemberian BSM

yang diperluas dan diperbesar akan dapat menekan siswa dari keluarga/masyarakat miskin putus sekolah. Melalui pendidikan taraf hidup keluarga/masyarakat miskin dapat diperbaiki dan ditingkatkan.

Pada tahun ajaran 2012 BSM diberikan kepada sekitar 20% siswa SD dan 24% siswa SMP, dengan nilai beasiswa sekitar Rp. 60.000/semester untuk siswa SD, sedangkan untuk siswa SMP nilai beasiswanya sekitar Rp. 500.000/semester, sedangkan untuk siswa SMA/SMK sebesar Rp.1.000.000,00 (Suara Merdeka 28 Maret 2012) . Setiap sekolah yang mendapat kuota tertentu, melakukan seleksi siswa yang berhak menerima, selanjutnya dana BSM diberikan langsung kepada siswa terpilih melalui kantor pos yang ditunjuk, beasiswa miskin diberikan langsung kepada siswa yang membutuhkan biasanya diberikan pada tahun ajaran baru. Tujuan kebijakan beasiswa miskin adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin serta untuk meringankan biaya pendidikan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu.

Permasalahan yang dialami masyarakat, meskipun beasiswa miskin diberikan Pemerintah kepada sekolah baik Sekolah Dasar ataupun Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan tetap saja setiap tahun ajaran baru atau penerimaan murid baru selalu memungut bantuan dana rutin berupa sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) atau dalam bentuk lain dengan berbagai dalih. Bahkan sampai saat ini masih ada laporan bahwa terdapat beberapa warga yang berasal dari warga miskin

dapat menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah favorite dengan standar nasional karena memang benar-benar punya prestasi yang bagus namun tetap dipungut biaya tambahan.

Pada penelitian ini akan dikaji perihal implementasi program bantuan siswa miskin bagi siswa SMA Negeri di Kota Binjai. Sebagai suatu bentuk implementasi program yang ditujukan bagi peningkatan sumber daya manusia anak-anak bangsa khususnya di Kota Binjai.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan di Kota Binjai, maka terdapat 7 (tujuh) SMA yang berstatus negeri dengan jumlah rata-rata penerima BSM yang hampir merata. Adapun jumlah siswa yang mendapatkan bantuan siswa miskin di SMA Negeri Kota Binjai dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1 Jumlah Siswa Yang Mendapat Bantuan Siswa Miskin di SMA Negeri Kota Binjai

No.	Nama Sekolah	Jlh Siswa Seluruhnya	Julh Siswa Yang Mendapat Bantuan
1.	SMA Negeri 1 Binjai	965	120
2.	SMA Negeri 2 Binjai	1.393	115
3.	SMA Negeri 3 Binjai	864	135
4.	SMA Negeri 4 Binjai	665	129
5.	SMA Negeri 5 Binjai	615	117
6.	SMA Negeri 6 Binjai	587	116
7.	SMA Negeri 7 Binjai	516	110
	J u m l a h	5.605	842

Sumber : Dinas Pendidikan Binjai Tahun 2013.

Berdasarkan data di atas maka dapat dikatakan rata-rata untuk setiap SMA Negeri di Kota Binjai siswa yang mendapatkan bantuan siswa miskin

ada sebanyak 120 jiwa. Sehingga apabila dijumlah dari seluruh siswa SMA negeri ada sebanyak 15 siswanya mendapat bantuan siswa miskin.

Sebagai suatu bentuk pelaksanaan pemerataan pendidikan pemberian bantuan siswa miskin juga memiliki dinamika tersendiri. Sesuai kondisi umum di Kota Binjai, apabila seseorang wali atau orang tua siswa harus membuat rekening untuk pencairan dana BSM ke Kantor Bank Cabang Pembantu maka dibutuhkan ongkos transportasi pulang pergi (PP) minimal Rp. 50.000, serta biaya pembukaan Rekening minimal Rp. 20.000. Begitu pula saat pencairan atau pengambilan Dana minimal dibutuhkan ongkos Rp. 50.000,- Hal ini jika berlaku normal, dalam artian semua persyaratan terpenuhi. Dalam kondisi seperti itu, jika jumlah dana BSM yang disalurkan sebesar Rp. 300.000 maka dana yang sesungguhnya diterima oleh Siswa/Orang Tua Siswa hanya Rp. 200.000.

Dalam sosialisasi dinyatakan bahwa pembuatan Rekening hanya sekali saja, rekening akan tetap aktif selama 3 bulan apabila sisa saldo sebesar Rp. 20.000.- Persoalan muncul apakah BSM akan disalurkan oleh Kementerian tiap bulan atau tiap tiga bulan sekali? Karena berdasarkan pengalaman BSM disalurkan paling banyak 2 kali dalam satu tahun, bahkan ada yang menerima sekali dalam satu tahun. Jika kondisi seperti ini kemungkinan besar rekening akan hangus, dan ketika dana BSM ada lagi ada kemungkinan harus membuat Rekening Baru. Pada masa menunggu pencairan dana BSM antara 6 atau 12 bulan jangan berharap orang tua siswa memperbaharui rekening dengan

menambah saldo.

Lebih sulit apabila kondisinya tidak normal, seperti adanya orang tua wali yang tidak memiliki KTP, tanda tangan di KTP yang tidak sama, tidak memiliki Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran maka dibutuhkan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan. Pada beberapa kasus tak jarang dibutuhkan biaya untuk keperluan tersebut.

Berbagai persoalan akan dihadapi orang tua tersebut berimbas pula pada sekolah. Bagi siswa atau orang tua siswa yang berada di pedesaan kebutuhan dana untuk menanggulangi transportasi siswa/orang tua siswa untuk pembuatan rekening BSM dan untuk pencairan dana BSM akan menjadi beban sekolah. Orang tua siswa yang betul-betul tidak mampu kemungkinan besar akan meminjam dana (menyerahkan) kepada pihak sekolah.

Berdasarkan kenyataan di atas, tidak sebaiknya pencairan atau penyaluran dana BSM khusus SMP kembali diserahkan kepada PT POS Indonesia karena persyaratan yang harus dipenuhi siswa atau orang tua siswa tidak terlalu rumit daripada melalui Rekening Bank. Melalui POS semua persyaratan bisa ditangani pihak sekolah, namun penerima dana langsung pada siswa atau orang tua siswa. Kalau pun tetap akan dilakukan melalui Bank, tidakkah sebaiknya cukup melalui Rekening Sekolah dengan syarat pihak sekolah menyerahkan bukti fisik penyerahan secara langsung kepada siswa atau orang tua siswa, atau saat pencairannya pihak bank datang langsung ke sekolah untuk menyerahkan dana tersebut kepada masing-masing siswa atau

orang tua siswa.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini mengambil judul “Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Bagi Siswa SMA Negeri di Kota Binjai”.

B. Perumusan Masalah

Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati tentang kedudukannya, kita tidak puas hanya dengan melihat saja, melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi program bantuan siswa miskin bagi siswa SMA Negeri di Kota Binjai?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program bantuan siswa miskin bagi siswa SMA Negeri di Kota Binjai?

C. Tujuan Penelitian

Arikunto (2003 : 52) menjelaskan “tujuan merupakan hal apa yang hendak dilakukan, sesuai dengan rencana yang dibuat, tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai”.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi program bantuan siswa miskin bagi siswa SMA Negeri di Kota Binjai.
2. Untuk menganalisis kendala dalam pelaksanaan program bantuan siswa miskin bagi siswa SMA Negeri di Kota Binjai

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan masukan bagi Dinas Pendidikan Kota Binjai dalam pelaksanaan program bantuan siswa miskin bagi siswa SMA Negeri di Kota Binjai.
2. Untuk mengetahui informasi tentang data empiris yang dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya. Sekaligus diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi instansi terkait dalam hal pelaksanaan program bantuan siswa miskin bagi siswa SMA Negeri di Kota Binjai.

E. Kerangka Pemikiran

Evaluasi merupakan sebuah proses untuk menentukan sejauhmana keberhasilan sebuah program/kegiatan. Keberhasilan program dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Sejalan dengan tujuan utama program bantuan siswa mandiri adalah untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan, program bantuan siswa mandiri juga merupakan

program untuk peningkatan mutu. Meningkatkan mutu pendidikan sebagai wujud dari hasil yang dicapai program. Dengan demikian, perubahan-perubahan atau manfaat tersebut mencerminkan bahwa program berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Penelitian ini berusaha mengevaluasi pelaksanaan suatu program bantuan siswa mandiri dalam rangka pemanfaatan dana bantuan siswa mandiri. Teori evaluasi program yang dikembangkan oleh Bruce W Tuckman dalam Silalahir (2002:42) meliputi pencapaian masukan (*input*), dengan melihat sumber daya manusia, bagaimana cara Dinas Pendidikan Kota Binjao mengelompokkan atau menempatkan orang-orang di dalam menyelesaikan pekerjaan, dan bagaimana sekolah memanfaatkan sumber-sumber yang ada (anggaran/dana) diperoleh dari pemerintah serta prosedur kerja untuk mencapai tujuan program.

Kedua, pencapaian proses (*process*), melihat bagaimana mekanisme yang digunakan dalam mengelola bantuan siswa mandiri sehingga dapat mengubah sesuatu menjadi lebih bermanfaat dalam hal ini pemanfaatan dana yang dikelola oleh siswa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta buku pedoman bantuan siswa mandiri. Keluaran (*output*), merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam hal ini implementasi dari program bantuan siswa mandiri.

Berdasarkan uraian di atas, sebelum melakukan penelitian penulis merumuskan kerangka pemikiran sebagai dasar dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 1

Kerangka Pemikiran

